



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Cegah Kasus Mirip ACT, Ayo, Periksa Lembaga Pengumpul Dana Sosial
Tanggal : Sabtu, 06 Agustus 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Cegah Kasus Mirip ACT Ayo, Periksa Lembaga Pengumpul Dana Sosial

SENAYAN meminta Kementerian Sosial (Kemensos) mengaudit 176 lembaga sosial yang serupa dengan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan diduga menyelewengkan dana. Ini temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta Kemensos belajar dari kasus ACT. Periksa semua lembaga pengumpul dana masyarakat agar tidak terjadi lagi kasus penyelewengan.

“Penegak hukum juga harus tegas kepada lembaga mana pun yang melakukan tindakan melanggar hukum, dengan cara melakukan penyelewengan bantuan berkedok filantropi Islam,” ujar Ace dalam keterangannya, kemarin.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengaku, pihaknya menemukan 176 lembaga filantropi yang melakukan penyalahgunaan dana sumbangan masyarakat. Data-data lembaga filantropi itu kini telah diserahkan ke Kemensos.

“Ada 176 entitas yayasan yang kami serahkan (ke Kemensos) untuk diperdalam. Selain terkait kasus yang sedang didalami oleh Bareskrim Polri,” ujar Ivan di

Jakarta, kemarin.

Ivan menyebut bentuk penyimpangan dana masyarakat di 176 lembaga filantropi tersebut. Di antaranya, aliran dana yang mengalir ke pengurus yayasan hingga ke lembaga hukum bentukan lembaga tersebut. Namun, dia tak merinci nama lembaga filantropi yang menggunakan modus seperti ACT.

Untuk menyelidiki hal itu, PPATK sepakat dengan Kemensos membentuk tim khusus.

“Nanti akan kami bentuk segera satgas bersama agar yayasan PUB (pengumpul uang barang) ini bisa dikelola dengan benar, diawasi dengan benar, dan memiliki akuntabilitas,” kata dia.

(Mensos) Tri Rismaharini akan menugaskan tim khusus (Timsus) bersama PPATK turut mengusut penyelewengan dana bansos.

“Melalui tim khusus ini, mungkin bisa PPATK menelusuri, kemudian bergerak,” harap Risma di Jakarta, kemarin.

Risma mengatakan, Timsus ini akan diisi oleh PNS dari Kemensos dan PPATK, serta ahli keuangan.

“Dari kami kemungkinan ada yang bukan PNS, tapi dia ahli masalah keuangan,” pungkasnya. ■ TIF